

Globalisasi dan Kearifan Local

(Menyikapi Globalisasi, Refleksi Terhadap komunitas *Pattuvam Panchayat* di India)

Retnowati

Abstract

Globalization as both historical process and economic project gives impact toward human's social structure and welfare. Some positive impacts of globalization are information that can be accessed quickly, massively and economically as well as global communication and transaction network that links human's life. On the other hand, the negative impacts are social, cultural, religious political, and business competition as well as environmental damage because of excessive exploitation and exploration over natural resources.

Vandana Shiva stated that globalization is a form of coercion of one culture over another culture (not a form of interaction among cultures). India's critical attitude toward globalization is manifested in *Pattuvam Panchayat Community*. This is very active alternative community in addressing and criticizing globalization along with its impact through some movements such as developing its diversity of life-the state/government is not allowed to use life's diversity *Pattuvam Panchayat Community*. With natural seeds, the proclaims itself as free from chemicals through the practice of "free" farming. The firmly say to "no" to piracy – *Gandhi* called this as: SATYAGRAHA, struggle for truth.

The impact of globalization for the life of India community pioneered by Vandana Shiva teaches the importance of learning from local community wisdom when dealing with globalization strike.

Keyword: Globalization, local community, living seeds

Abstrak

Globalisasi sebagai sebuah proses sejarah dan sekaligus sebuah proyek ekonomi memberi pengaruh terhadap struktur sosial dan tingkat kesejahteraan manusia. Ada pengaruh yang bersifat positif seperti tersedianya informasi yang dapat diakses secara cepat, massif, dan ekonomis serta terjalannya kehidupan manusia oleh jaringan komunikasi dan transaksi global. Namun ada pula pengaruh negatif seperti persaingan sosial, budaya, agama, politik, dan bisnis, kerusakan lingkungan alam akibat eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan.

Vandana Shiva (2000) menyebutkan, globalisasi sebuah bentuk pemaksaan dari satu budaya tertentu kepada budaya yang lain (bukan sebuah interaksi antar budaya). Kekritisan India menyikapi globalisasi diwujudkan dengan terbentuknya *Komunitas Pattuvam Panchayat*. Komunitas ini menjadi komunitas alternatif yang sangat aktif menyikapi dan mengkritisi globalisasi beserta dampak-dampak negatifnya melalui berbagai gerakan antara lain, membangun keanekaragaman kehidupannya sendiri-negara/pemerintah tidak boleh memanfaatkan keanekaragaman hidup

Pattuvam Panchayat. Melalui biji alami komunitas menyatakan bebas dari zat-zat kimia, dengan mempraktekkan sebuah pertanian “bebas”. Mereka dengan tegas mengatakan “tidak” kepada pembajakan-Gandhi menyebut penolakan ini: SATYAGRAHA, yang artinya: Perjuangan untuk kebenaran.

Dampak globalisasi bagi kehidupan komunitas India yang dipelopori Vandana Shiva memberi inspirasi bagi kita bahwa perlunya belajar dari kearifan komunitas lokal ketika berhadapan dengan gempuran keras globalisasi.

Kata Kunci : Globalisasi, Komunitas lokal, Biji-biji hidup

Pengantar

Globalisasi telah berlangsung lama sekali dalam sejarah peradaban manusia. Pada jaman prasejarah orang telah berkeinginan keluar dari ruang lingkup suku dan komunitasnya sendiri untuk melihat dunia dari berbagai belahan. Perkembangan dunia kontemporer tidak lagi digerakkan oleh orang-orang tertentu dalam suatu negara tetapi didorong oleh dinamika hubungan antara komunitas-komunitas lintas negara dalam sebuah relasi global. Karena itu pada masa kini membatasi perkembangan dunia hanya pada negara jelas terlalu sempit. Dunia sekarang telah memungkinkan semua pihak berkomunikasi dan bertransaksi tanpa dibatasi regulasi ketat negara yang masih memegang teguh kedaulatan, inilah dunia yang telah terglobalisasi.

Globalisasi bagaikan gelombang besar yang menghantam dunia dan seolah-olah tidak ada lagi pilihan untuk mengelak darinya. Terlepas dari perdebatan apakah “gelombang besar” tersebut ada atau tidak, namun fakta mencatat bahwa dunia memang sedang berada dalam batas-batas yang hampir tidak jelas lagi yang didukung oleh perkembangan teknologi, ekonomi, dan informasi menjadikan dunia seperti layaknya perkampungan.

Sejak kemunculannya, globalisasi telah secara perlahan merombak relasi antar actor dalam hubungan internasional. Penemuan-penemuan alat komunikasi dan transportasi telah mendorong akselerasi proses globalisasi. Penemuan radio memungkinkan orang berkomunikasi melintasi batas wilayah negara. Penemuan pesawat terbang menjadikan waktu tempuh antarnegara semakin singkat sehingga melancarkan komunikasi dan transportasi. Seiring dengan perkembangan alat komunikasi dan transportasi tersebut maka hubungan antar manusia semakin mudah dan meluas melintasi batas-batas wilayah. Bersamaan dengan itu negara-negara di dunia juga kian meningkat hubungannya.

Dari segi finansial (yang biasanya menjadi wacana pokok globalisasi, di samping telekomunikasi) maka perdagangan regional atau lintas benua telah memunculkan interaksi sosial antar suku. Sejak itu aspek finansial atau aspek keuangan sudah mulai mendunia. Perkembangan yang kuat dari aspek finansial di hampir sebagian besar belahan dunia kemudian dikenal sebagai globalisasi. Dengan demikian globalisasi dapat dikatakan tidak lebih dari *expansionisme imperialis lewat finansial*. Diberinya makna tentang globalisasi sebagai imperialisme finansial menunjukkan bahwa aspek finansial (uang) mampu mengatur sektor real di banyak negara. Dalam hal inilah maka uang yang seharusnya hanya merupakan alat bagi perkembangan sektor real kemudian berubah bentuknya menjadi tujuan, menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan dan bersifat buas.

Prinsip penting globalisasi adalah sebagai sebuah proses multidimensional dalam aspek sosial, ekonomi, politik, kultural yang bergerak secara ekstensif dan intensif di dalam kehidupan masyarakat dunia sehingga persoalan ruang dan waktu menjadi poin penting dalam menjelaskan fenomena globalisasi. Persoalan ruang dan waktu telah mengalami perentangan tetapi sekaligus pemadatan antara keduanya (Giddens:1990). Kesadaran global seperti yang dijelaskan di atas tentu saja akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Namun demikian Robertson (1992)¹ mengatakan bahwa kesadaran global tersebut bukanlah kesadaran sebenarnya. Dalam arti pengakuan global tidak berarti harus mutlak benar bagi konteks tertentu (baca: lokal), seperti yang diingatkan Robertson, bahwa kesadaran global tidak menyiratkan konsensus global. Kesadaran global juga tidak mengartikan bahwa apa yang disadari tersebut adalah patokan sejati dan ideal bagi semua orang dan semua konteks, serta benar atau baik bagi semua orang. Dalam hal ini Robertson mengajak setiap orang terbuka dan menyadari bahwa individu atau komunitas bukanlah satu-satunya, namun perlu dipahami dalam konteks global. Dengan demikian individu atau komunitas dapat menyerap hal-hal penting yang dapat dipelajari dari bangsa lain dan pada saat yang sama juga harus mempersiapkan identitas partikular di tengah universalisme.

¹Roland Robertson is Professor of Sociology and Director of the Centre for the study of Globalization at the University of Aberdeen. His past and forthcoming publications include: *Globalization Social Theory and Global Culture* (Sage, 1992); Co editor of the six-volume *Globalization : Critical Concepts in Sociology* (Routledge, 2003); joint editor-in-chief of the *Encyclopedia of Globalization* (Grolier, 2005); Co-author of *Globality and Modernities* (Sage, 2004); and co author with David Inglis of *Globalization and Social Theory: Redefining Social Science* (Open University Press, Forthcoming, 2005). In addition, he has authored or edited many other books, articles or chapters on Globalization, religion, culture and theory.

Robertson Roland (1992) dalam tesisnya tentang *glokalisasi* menjelaskan bahwa globalisasi bukanlah masalah yang harus dihindari sebab globalisasi adalah peluang yang memberi ruang bagi yang partikular, yang berbeda untuk memiliki semangat dalam meningkatkan diri, memperbaharui keadaan dalam menemukan tradisi dan identitas komunal. Tekanan globalisasi dapat dilihat sebagai suatu hal yang positif yang dapat memajukan kehidupan suatu bangsa berpengaruh pada bangkitnya hal-hal yang bersifat partikular untuk semakin diperkuat dan sebagai asas kekuatan suatu bangsa/wilayah. Pengaruh globalisasi telah menimbulkan sejumlah gerakan yang partikular untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi pengaruh negative dari globalisasi yang dapat menghancurkan entitas nasional suatu bangsa.

Globalisasi memang penuh dengan paradox (Braungart & Braungart, 1997). Terdapat ketidakonsistenan kondisi globalisasi, di satu sisi globalisasi membuat dunia menuju kearah yang lebih demokratis, hak asasi manusia semakin dihormati, kesetaraan, keterbukaan dan transformasi semakin dimudahkan namun di sisi lain proses ini juga menghasilkan bentuk penindasan dan dominasi baru yang diyakini akan membahayakan kemanusiaan (Stevenson 1997). Globalisasi juga diwarnai oleh perdebatan antara konvergensi dengan divergensi dalam politik, ekonomi, kesehatan, hukum, standarisasi kesejahteraan sosial. Di sinilah kita melihat sikap paradoksal dari globalisasi.

Dalam buku Asia Megatrens yang ditulis John Naisbitt yang sangat terkenal itu, dijelaskan peristiwa-peristiwa sekitar akhir dekade delapan puluhan hingga awal dekade sembilan puluhan, saat dimana ekonomi Asia mengalami perkembangan yang sangat pesat ditandai dengan adanya pergeseran-pergeseran hebat di Asia pada dekade delapan sampai sembilan puluhan. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari negara bangsa ke jaringan, dari ekspor ke tuntutan konsumen, dari barat ke cara-cara Asia, dari kontrol pemerintah ke pasar, dari desa ke metropolitan, dari dominasi pria ke wanita, dari padat karya ke teknologi canggih dan dari barat ke timur. Pergeseran-pergeseran tersebut didasari oleh tampilnya jaringan kokoh para pebisnis Cina perantauan di Asia, merebaknya budaya dan religiusitas di dunia, kemajuan yang tiba-tiba gencar yang nampak pada penampilan Asia sebagai manusia-manusia yang pantang menyerah dan belajar mengadopsi teknologi. Kemajuan teknologi mulai menyentuh Asia namun sayangnya infrastruktur rasionalnya belum siap, pondasi kemajuan Asia secara rasional masih dangkal sehingga sangat rapuh. Banyak negara-negara di Asia yang tiba-tiba

menjadi kaya tetapi belum siap menggunakan kekayaannya. Kecenderungannya kemudian adalah menjadikan “kekayaannya” sebagai tujuan bukan alat untuk mengembangkan diri.

Menarik jika kondisi seperti ini diaplikasikan dengan hidup sehari-hari konteks Indonesia. Kita tahu bahwa sistem ekonomi bisnis Indonesia rentan *collapse*, sebab pondasi sistem hukum Indonesia tidak cukup kokoh mempondasi aktivitas bisnis, sehingga KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menggurita dan tidak ada ujungnya. Trend ekonomi pertumbuhan di Indonesia juga sangat rentan, karena ekonomi yang dijalankan para konglomerat mengabaikan rakyat kecil dan hanya memicu pertumbuhan ekonomi negara. Pelaku ekonomi adalah para kapitalis. Dalam hal ini negara-negara seperti Indonesia, Cina, Thailand, Hongkong, Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura, memang terpacu untuk maju secara sangat cepat tetapi akhirnya terjatuh terpuruk menyusul krisis sosial politik yang berkepanjangan karena beban hutang yang menumpuk. Memang ada negara-negara Asia yang maju karena kerja keras, namun ada juga yang maju karena kucuran hutang dan ketergantungannya yang akut terhadap negara lain, akibatnya kemakmuran yang dimiliki adalah kemakmuran semu dan karena itu sangat rentan. Kondisi seperti ini pada umumnya terjadi pada negara dunia ketiga termasuk Indonesia, dan sadar atau tidak telah berdampak pada nilai-nilai dan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan.

Kritik besar Goldsmith tentang globalisasi yang disampaikan dalam tulisannya *The Trap* (1993-1994)² menunjuk pada kesalahan dari konsep umum yang menilai bahwa ilmu, teknologi dan ekonomi adalah sebagai tujuan dan bukan sarana atau alat untuk mengejar kesejahteraan manusia. Dalam hal ini sikap masyarakat modern mengenai ilmu, kemajuan teknologi dan ekonomi sangat berlebihan, cenderung memuja dan dijadikan sebagai tujuan hidup. Padahal kemajuan ekonomi hanya sebagai alat untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan. Goldsmith juga mengkritisi bahwa berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dunia nyatanya tidak mendatangkan berbagai peningkatan kemajuan diberbagai bidang kehidupan, malah justru menghasilkan dampak negative dan ketidakadilan sosial yang cukup besar bagi masyarakat dunia. Amerika dan Inggris misalnya, telah mengalami peningkatan PNB beberapa kali lipat dalam beberapa tahun yang lalu, tetapi mengalami krisis sosial yang rumit diselesaikan, sebab indikator yang

² James Goldsmith. *Perangkap*. (Kata Pengantar Moctar Lubis) – Judul asli *The Trap*. 1993-1994.

selama ini dipakai oleh Inggris dan Amerika untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemakmuran masyarakat sesungguhnya memiliki sejumlah titik lemah bahkan rawan. Sebab indikator PNB hanya menilai seberapa besar tingkat aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam sebuah negara tanpa secara kualitatif melakukan penilaian terhadap aktivitas tersebut apakah sungguh berdampak pada kesejahteraan rakyat atau tidak. Jika sejauh ini indikator PNB (*Produk Nasional Bruto*) digunakan untuk mengukur, maka telah terjadi kekeliruan yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tragis bagi masyarakat, demikian menurut Goldsmith. Pertumbuhan ekonomi menurutnya, hanya bermanfaat bila mendukung kebutuhan masyarakat dan apabila tidak, maka pertumbuhan tersebut tidak ada gunanya dan bahkan hanya akan membawa kehancuran.

Dengan demikian para ahli pembangunan di negara-negara sedang berkembang perlu waspada dan mengkaji ulang berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini sudah dilakukan. Goldsmith menyarankan untuk memahami atau mengukur suatu kualitas dalam negara bukan dari sisi material saja, melainkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini menyangkut masalah spiritualitas, kesehatan, pendidikan di samping juga ekonomi. Pembangunan ekonomi sekali lagi hanya sebagai alat, sebagai sarana agar cita-cita kemakmuran masyarakat dapat tercapai bukan satu-satunya dan bukan sebagai tujuan. Ketika GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*) digunakan sebagai instrument, maka terjadi ketimpangan dan ketidakstabilan di negara-negara industri dan negara-negara dunia ketiga sehingga menciptakan pengangguran dan kemiskinan yang semakin besar. Terakhir Goldsmith menjelaskan dalam *The Trap*, tentang artifisial dari suatu kelembagaan yang disebut negara. Tujuan negara seharusnya adalah menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Karena itu negara harus bisa memberi jaminan semua warganya. Dalam hal ini dibutuhkan peran negara dan lembaga agar menyediakan pedoman, sumber daya manusia dan alam, menyediakan stabilitas dan ketentraman bagi seluruh anggota masyarakat. Masyarakat bukanlah kumpulan individu tetapi terdiri dari sejumlah keluarga dan komunitas lokal yang memiliki tujuan kesejahteraan. Maka dengan demikian negara wajib memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan/perlindungan demi kesejahteraan seluruh warganya. Lembaga negara dan lembaga apapun dengan demikian tidak hanya menyediakan batasan-batasan dan aturan-aturan bagi warganya, namun yang terpenting mampu menyediakan dan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana yang

bersumber dari sumber daya yang dimilikinya, yang bersumber dari rakyat sendiri, sehingga setiap orang dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan sendiri apa yang dibutuhkan tentu saja dengan didampingi oleh lembaga negara.

Kekeliruan budaya modern mengajar untuk percaya bahwa semua persoalan dapat *diukur* dan diselesaikan dengan memajukan perekonomian bukannya *memahami* kemajuan ekonomi untuk tujuan apa (Goldsmith, 1993-1994). Goldsmith melihat perdagangan bebas global, bioteknologi dan energi nuklir yang selama ini dianggap sebagai penyelamat, nyatanya telah menjadi perangkap yang menimbulkan permasalahan sosial, pengangguran, kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Memang pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan sepanjang pertumbuhan tersebut bermanfaat dalam mendukung kebutuhan masyarakat, memperkuat stabilitas dan meningkatkan perasaan puas, namun jika tidak bermanfaat bagi masyarakat maka hanya akan menguntungkan segelintir orang saja dan menyengsarakan banyak orang. Sebab itu perlu ditumbuhkan paradigma bahwa perekonomian adalah sarana untuk melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Kesalahan lain yang sejalan dengan itu adalah sikap pemerintah yang dinyatakan dalam kebijakan-kebijakannya berupa persepsi yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pokok bagi keberhasilan suatu bangsa. Dalam hal ini Goldsmith menyinggung banyak mengenai PNB yang dinilai sebagai indeks resmi dalam memulai kemakmuran. Padahal PNB hanya mengukur aktivitas publik. Yang berhubungan langsung dengan perekonomian formal, hanya berakibat nyata terhadap transaksi moneter dalam satu negara. Pada saat yang sama PNB tidaklah mengukur tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat sehingga ukuran yang dibuat pemerintah, tidak akan sama dengan kondisi riil dalam masyarakat.

Belajar dari perempuan India dalam menyikapi globalisasi demi mengupayakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera di tengah kekuasaan yang meraja memberi inspirasi untuk melihat alternative lain dalam rangka mengupayakan kehidupan yang lebih bermakna di era global. Menarik karena perempuan India melalui *Komunitas Pattuvam Panchayat* telah melakukan peranan penting dalam mempertahankan dan menjaga kehidupan dalam menghadapi kekuatan globalisasi. Disebutkan bahwa ada 3 gelombang globalisasi. *Pertama*, penjajahan terhadap Amerika, Afrika, Asia dan Australia oleh kekuasaan Eropa yang berlangsung sekitar 1.500 tahun. *Kedua*

pemaksaan dari gagasan-gagasan barat tentang “perkembangan” pada budaya-budaya diluar barat atau non barat di era postkolonial sepanjang 50 tahun. *Ketiga*, globalisasi sebagai era “perdagangan bebas yang berlangsung kira-kira 5 tahun yang lalu, yang oleh dunia ketiga dipandang sebagai jaman penjajahan kembali. Bahwa setiap gelombang globalisasi ini adalah untuk kepentingan barat dan setiap gelombang merupakan penjajahan barat atas kebudayaan-kebudayaan non barat dan penjajahan atas kehidupan planet bumi ini. Dampak komulatif masing-masing gelombang adalah untuk “melayani” barat dan telah menciptakan kolonialisasi yang lebih mendalam dari budaya-budaya lainnya dan kolonialisasi dari kehidupan di planet bumi.

Dalam kondisi yang demikian itulah maka komunitas *Panghayat* di India, telah melakukan perlawanan secara terbuka terhadap negara dan pihak-pihak yang ingin menguasai tanah dan terus bertahan terhadap kondisi alam yang tidak menguntungkan.

Strategi India Dalam “melawan” Gempuran Globalisasi

Vandana Shiva (2000)³ melihat bahwa “global” berarti ditariknya yang lokal ke global. Dengan tegas ia mengatakan bahwa globalisasi mewakili sikap tidak bertanggungjawab dan kurangnya tindakan timbal balik yang seimbang antara yang lokal dan global. Tidak ada keseimbangan yang sehat yang dihasilkan oleh globalisasi selain pemaksaan dari yang global ke lokal. Dalam hal ini Shiva memaparkan pengalaman India dengan menunjukkan data tentang “kejahatan” yang dilakukan oleh Amerika terhadap India.

Shiva menyebutkan negara maju justru yang paling banyak menyumbang kerusakan lingkungan misalnya, pemancaran penyinaran karbondioksida yang diproduksi negara industrialisasi. Sementara itu negara berkembang memproduksi 90% dari limbah produksi yang berbahaya di seluruh dunia tiap tahun, hal tersebut dapat dilihat pada pembuangan limbah dari negara bagian utara ke selatan. Amerika menghasilkan lebih dari 275 juta ton limbah beracun setiap tahun dan menjadi negara terdepan yang memelopori dalam hal mengekspor limbah. Ironisnya Amerika jugalah satu dari 161 negara yang ikut menandatangani konvensi Basel Internasional, namun justru yang paling banyak menghasilkan limbah beracun dan membuangnya ke selatan.

³ Original publication details: Excerpted from Vandana Shiva, “*Ecological Balance in an Era of Globalization*” in Paul Wapner and Laster Edwin J Rulz (eds). *Principled World Politics: The Chalange of Normative International Relation* (Rowman & Littlefield Publishing Group).

Dalam hal kerusakan lingkungan Shiva secara tegas mengatakan bahwa globalisasi sejauh ini telah terpisah dari lingkungan bahkan telah menghancurkan lingkungan, yang pada gilirannya juga akan menghancurkan semua makhluk di bumi ini. Globalisasi yang dikatakan menciptakan banyak kemajuan dibidang perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan justru menciptakan kemiskinan baru akibat dari perdagangan bebas dan investasi yang menciptakan pertumbuhan namun sekaligus menghancurkan mata pencaharian masyarakat. Melihat semakin kuatnya kekuasaan yang menimpa masyarakat, maka komunitas India mencanangkan pergerakan untuk deklarasi dari hak-hak komunitas terhadap keanekaragaman hidup yang diwujudkan dengan: *Pertama* larangan impor limbah beracun dan pembuangan racun oleh organisasi-organisasi non pemerintah. Orang-orang tribal dari berbagai penjuru India melakukan mogok makan, memaksa pemerintah agar mengakui deklarasi mereka tentang “peraturan sendiri” dengan menerbitkan pernyataan tertulis. *Kedua*, komunitas mengatur urusannya sendiri sesuai dengan tradisi-tradisi dan kebiasaannya sendiri. *Ketiga*, melindungi dan memelihara tradisi dan kebiasaan dari komunitas lokal, identitas kebudayaan dan sumber-sumber komunitas. *Keempat*, mengakui komunitas sebagai yang memiliki kuasa yang kompeten untuk pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber, nilai kebudayaan, tradisi-tradisi dan hak komunitas terhadap sumber-sumber umum.

Kekritisan India menyikapi globalisasi ini diwujudkan dengan terbentuknya *Komunitas Pattuvam Panchayat*. Komunitas ini menjadi komunitas alternative yang sangat aktif menyikapi dan mengkritisi globalisasi beserta dampak-dampak negatifnya melalui berbagai gerakan antara lain membangun keanekaragaman kehidupannya sendiri. Dalam hal ini negara atau pemerintah tidak boleh memanfaatkan keanekaragaman hidup *Pattuvam Panchayat*, melalui biji alami komunitas menyatakan bebas dari zat-zat kimia yang diwujudkan dengan mempraktekkan sebuah pertanian “bebas”. Mereka dengan tegas mengatakan “tidak” kepada pembajakan. Gandhi menyebut penolakan ini dengan sebutan SATYAGRAHA artinya: Perjuangan untuk kebenaran. Langkah *Pattuvam Panchayat* ini menunjukkan satu komitmen untuk meremajakan dan melindungi keanekaragaman hidup dan sistem pengetahuan tentang kekuatan eksploratif dari liberalisasi ekonomi.

Biji-biji sebagai symbol kehidupan baru, dimulai dari yang kecil dan sederhana

Untuk melawan kekuatan raksasa, kekerasan dan kekuasaan globalisasi, komunitas India melakukan alternative-alternarive baru yang dilakukan oleh orang-orang sederhana, kecil, korban-korban kekuatan raksasa. Bagi komunitas India dampak buruk yang ditimbulkan globalisasi membutuhkan sebuah gerakan untuk memperlambat dan mengurangi laju perkembangan yang menghancurkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kearifan lokal dari setiap wilayah. Orang-orang tribal melakukan mogok makan dan memaksa pemerintah untuk mengakui deklarasi tentang peraturan komunitas lokal, bahwa mereka akan mengatur kehidupan sendiri berdasarkan sumber nilai, kebudayaan, tradisi-tradisi dan hak komunitas terhadap sumber-sumber daya alam milik mereka. Komunitas *Pattuvam Panchayat* membangun keanekaragaman kehidupan sendiri bebas dari zat-zat kimia. Dari perspektif ini Shiva memulai tindakannya bersama dengan perempuan-perempuan India yakni melakukan “perlawanan” terhadap globalisasi. Para perempuan menanam biji-bijian di halaman rumahnya dan menjadikannya sebagai simbol kehidupan baru. Menanam biji-bijian menyimbolkan hadirnya kehidupan baru melalui yang serba kecil. Dari yang kecil dan sederhana inilah akan tumbuh pohon yang akan terus berkembang, bertumbuh menjadi pohon besar dan rindang sehingga mampu melindungi dan mengayomi banyak orang. Dengan demikian di tengah gempuran globalisasi akan diperoleh perdamaian, keadilan, demokrasi dan masyarakat yang sejahtera yang dimulai dari diri sendiri dan diyakini dapat membawa perubahan dan kekuatan besar.

Biji-biji sebagai sebuah simbol kehidupan baru memberi arti bahwa setiap individu mempunyai potensi dan kekuatan raksasa yang selama ini sering tidak diperhitungkan. Dalam hal ini India menjadi pelopor untuk melakukan gerakan mulai dari yang sederhana untuk melawan sebuah kekuatan raksasa. Langkah ini menjadi sebuah alternative untuk menemukan kehidupan baru yang menjanjikan. Biji-biji hidup juga menciptakan alternatif yakni membangun dan menguatkan persediaan biji para petani dan menjadi pilihan pertanian yang dapat dipertahankan sesuai untuk daerah-daerah yang berbeda-beda. Biji hidup merupakan simbol kebebasan di era manipulasi dan monopoli. Seperti halnya “*Charkha*” (roda yang berputar) menjadi sebuah simbol kebebasan bukan karena besar dan berkuasa tetapi karena kecil namun mampu hidup di tengah gempuran kekuatan raksasa. Yang kecil dan terluka karena tindakan yang

tengah berkuasa mampu melakukan penolakan secara kreatif demi kehidupan yang berkualitas. Biji kecil mewujudkan keanekaragaman, kebebasan untuk bertahan hidup. Biji merupakan properti umum dari para petani kecil India yang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Di dalam biji terdapat keanekaragaman kebudayaan yang saling bertemu dengan keanekaragaman biologis. Gerakan ini menyentuh isu ekologis, menyatukan keadilan sosial, kedamaian dan demokrasi.

Dalam konteks inilah maka dinamika globalisasi dan kekerasan dihubungkan dengan dan bagi rakyat India yang sedang menghadapi tantangan. Karakter dan kekuatan globalisasi yang kemampuannya menggagalkan pertanggungjawaban warga negara justru menjadi semangat pergerakan lokal yang diwujudkan penolakan-penolakan yang dilakukan. Globalisasi yang mengancam demokrasi, mengancam keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan dan mengancam kesejahteraan ekologi secara umum digugat oleh komunitas lokal dengan semangat kejujuran dan kesederhanaan yang diilhami oleh keadilan dan perlindungan terhadap lingkungan. Dengan demikian meski globalisasi menghasilkan kekerasan brutal namun mampu dilawan oleh komunitas lokal. Di sinilah kita melihat bahwa yang termarginalkan dan terlupakan masih mempunyai harapan karena keberaniannya membuat alternatif dan inovasi demi mewujudkan kemitraan dengan alam dan manusia. Saat segala sesuatu "diseragamkan" oleh globalisasi tetap dibutuhkan yang berbeda, dibutuhkan keanekaan, keberagaman dan kekhasan yang dimiliki komunitas lokal sebab tidak semua komunitas, daerah, budaya atau segala aspek kehidupan manusia dapat diseragamkan oleh globalisasi. Oleh karena itu potensi lokal bisa menjadi pijakan untuk menghadapi globalisasi dan segala dampaknya.

Globalisasi dan Pemiskinan Rakyat: Konteks Indonesia.

Berbicara tentang dampak globalisasi bagi kesejahteraan masyarakat, yang paling menyolok adalah yang terkait dengan masalah kemiskinan yang menimpa sebagian besar rakyat Indonesia. Faktor yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah ketidakstabilan pemerintah. Penjajahan Belanda tidak meninggalkan sistem pemerintahan seperti penjajahan Inggris, karena itu meninggalkan ketidakpastian sistem pemerintahan pasca kemerdekaan. Kita mengenal demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, kemudian sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pernah juga dengan sistem kabinet parlementer dan kemudian sekarang presidensial.

Perubahan-perubahan tersebut membuat energi terkuras dan tidak fokus untuk upaya kesejahteraan rakyat, sesuatu yang tidak terjadi di Malaysia, India dan Negara-negara bekas jajahan Inggris.

Jebakan ketergantungan

Pada zaman Orde Lama berlangsungnya sistem partai membuat masyarakat terkotak-kotak. Seolah-olah orang hanya bernilai kalau masuk dalam sistem yang berlaku dan menjadi sebuah partai. Kondisi seperti ini tidak terjadi karena Rezim Orde Lama yang dikenal dengan jargon politik sebagai panglima (politik komando). Berlawanan dengan Orde Lama, Orde Baru mengedepankan ekonomi sebagai panglima. Rezim yang berkuasa menyebut Orde Baru sebagai orde Pembangunan atau pembangunan ekonomi. Kemudian mereka menetapkan sistem sentralisasi, semua pendapatan negara dipusatkan di Jakarta, kemudian dibagikan melalui daftar isian proyek. Melalui Proyek-proyek ini diharapkan pertumbuhan ekonomi berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bergantung pada proyek-proyek yang disetujui pusat. Di luar sistem proyek ini, keberdayaan masyarakat kurang diperhatikan. Jebakan ketergantungan berlanjut pada era desentralisasi. Kedua sistem ini berinteraksi dan terjadi di daerah.

Maka upaya untuk menyejahterakan rakyat utamanya harus mampu melepaskan diri dari jebakan ketergantungan yang mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan ini. Disinilah diperlukan kebijakan pemerintah, komitmen organisasi dan sarana yang mendukung. Lebih dari semua itu dibutuhkan suatu sikap yang bersumber dari keyakinan bahwa setiap usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi rakyat adalah tidak memperlakukan rakyat sebagai obyek, tetapi harus subyek. Apabila potensi manusia yang serba sedikit ini diberdayakan, digalang dan dihimpun maka yang lemah, miskin dan tidak berdaya akan berkembang hingga mampu mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan kekuatannya sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain.

Dalam hal inilah maka sumber daya lokal perlu mendorong kemandirian diri sendiri (dan tentu saja dengan dukungan pemerintah). Apabila ada program dari pemerintah, maka komunitas lokal berperan sebagai penerima sekaligus mengelola sendiri program tersebut tanpa campur tangan dan intervensi pihak-pihak luar. Partisipasi harus dilakukan oleh masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, kelompok

adat, koperasi primer dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan lembaga pelayanan dan pemberdayaan sumber daya manusia berupa lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian dan pengembangan.

Belajar dari pengalaman sejarah yang tidak selalu menguntungkan seperti yang dijelaskan di atas, akibat dari pemerintahan Indonesia jaman orde baru sangat mengedepankan dan mengandalkan ekonomi sebagai segala-galanya yang mana ketika itu diterapkan sistem sentralisasi, semua pendapatan negara dipusatkan ke ibu kota Jakarta kemudian dibagikan melalui proyek-proyek. Di sinilah letak kelemahan pemerintah yaitu, ketika sumber daya manusia, khususnya yang ada di daerah terabaikan dan tidak diberdayakan, padahal sumber daya daerah lokal justru memiliki potensi yang sangat besar dan dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat apabila dikelola dengan baik. Sumber daya lokal akan menemukan potensi diri ketika diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga tidak tergantung pada orang lain. Namun jebakan ketergantungan yang sudah terlanjur terjadi sekarang ini menjadikan sumber daya lokal tidak dapat berkembang.

Devaluasi Mata Uang yang Sangat Besar

Kalau kita teliti menghitung, tanpa disadari, nilai rupiah kita telah mengalami devaluasi sebesar 50.000.000.000 persen selama 60 tahun. Proses ini dapat digambarkan berikut: (1) th 1950an terjadi sanering 50 % ; (2). Tahun 1966 dilakukan penyusutan keuangan Rp. 1000 menjadi Rp (100.000 %) ; 3) tahun 1967 nilai rupiah menurun 1 dolar AS= Rp 84- Rp 100 atau rata-rata Rp. 92; 4) tahun 1997 terjadi krisis moneter yang dahsyat sehingga nilai rupiah merosot drastis. Kini Dolar AS = sekitar Rp. 9.300 lebih (10.000 %). Apabila dibandingkan dengan Negara Thailand 60 tahun lalu 1 dollar AS = 20 bath, sekarang 1 dollar AS – 12 bath (60 %). Keadaan ini jelas merupakan pemiskinan yang sistematis.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Praktek KKN juga telah menjadikan sejumlah elite ekonomi dan politik kaya raya dalam waktu pendek tanpa perlu bekerja keras sehingga program-program pembangunan untuk keberdayaan rakyat menjadi terlantar. Hal lain yang merusak seluruh masyarakat bangsa adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktik ini sudah sangat menggurita dan menggrogoti kekayaan negara yang sesungguhnya

merupakan kekayaan rakyat. Para elit politik dan orang-orang berkuasa kaya raya tanpa harus bekerja keras, sementara rakyat tetap miskin walaupun sudah bekerja keras. Tidak jarang pemerintah melindungi dan membela perusahaan-perusahaan saat mereka bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam milik masyarakat (yang tidak memiliki kekuasaan). Padahal dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini cenderung berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Sekali lagi korban yang terbesar atas perlakuan ini adalah rakyat kecil. Sementara itu program pembangunan untuk memberdayakan rakyat diabaikan bahkan "dikorbankan" atas nama pembangunan yang dinikmati oleh segelintir orang saja.

Bencana Alam

Keadaan buruk ini diperparah dengan adanya bencana alam yang semakin sering terjadi di Indonesia, mengingat banyak wilayah dan kepulauan di Indonesia yang memang rawan bencana. Letusan gunung berapi, banjir, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya tidak bisa dihindarkan oleh beberapa wilayah karena memang wilayah benua maritim Indonesia berada dalam lempengan bumi yang rentan bencana. Sementara itu pemerintah belum siap melakukan strategi-strategi untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana alam. Pemerintah juga tidak tanggap untuk mengantisipasi pemukiman dan tempat tinggal masyarakat agar terselamatkan dari bencana. Para korban bencana alampun sering tidak segera ditangani dengan baik pada pasca bencana, sehingga mereka harus berbulan-bulan bahkan tahun tinggal di kamp-kamp dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap menghadapi ancaman bencana dan upaya-upaya strategis dalam pengorganisasian mitigasi bencana baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam hal ini sistem mitigasi bencana perlu dibangun karena Indonesia hidup di benua maritim yang rentan bencana, hal ini menuntut sikap hidup yang berani menghadapi bencana secara cerdas. Sebab bencana dalam waktu sekejap bisa mengakibatkan ketidakberdayaan rakyat secara dahsyat.

Kerusakan Lingkungan

Ketidakperdulian terhadap kelestarian lingkungan dan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani lebih serius. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh kerakusan manusia yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Banjir dan longsor terjadi karena ulah manusia yang melakukan kerusakan lingkungan, belum lagi penebangan hutan secara liar, diperkirakan 64 juta hektar (39,5 persen) dari 162 juta hektar (dalam lima tahun terakhir) hutan telah rusak; mengalihkan fungsi daerah aliran sungai menjadi daerah pemukiman; membuang limbah pabrik di aliran sungai; mengeksploitasi alam secara liar; polusi dari industri dan kendaraan bermotor. Maka upaya untuk menyejahterakan rakyat utamanya harus mampu melepaskan diri dari jebakan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan yang dialami secara langsung oleh rakyat.

Kalau diamati secara menyeluruh, kemiskinan itu ditandai oleh faktor-faktor seperti lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, lemahnya nilai tukar hasil produksi sumber daya manusia, tidak adanya akses terhadap sumber daya, rendahnya teknologi, rendahnya pendapatan, adanya kesenjangan dalam pembangunan nasional, dan lemahnya posisi tawar menawar. Namun apabila dikaitkan dengan berbagai faktor, kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor struktural.

Di sinilah diperlukan kebijakan pemerintah, komitmen organisasi dan sarana yang mendukung. Lebih dari semua itu dibutuhkan suatu sikap yang bersumber dari keyakinan bahwa setiap usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi rakyat adalah tidak memperlakukan rakyat sebagai obyek, tetapi harus subyek. Apabila potensi manusia yang serba sedikit ini diberdayakan, digalang dan dihimpun maka yang lemah, miskin dan tidak berdaya akan berkembang hingga mampu mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan kekuatannya sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain.

Dalam hal inilah maka sumber daya lokal perlu mendorong kemandirian diri sendiri (dan tentu saja dengan dukungan pemerintah). Apabila ada program dari pemerintah, maka komunitas lokal berperan sebagai penerima sekaligus mengelola sendiri program tersebut tanpa campur tangan dan intervensi pihak-pihak luar. Partisipasi harus dilakukan oleh masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, kelompok

adat, koperasi primer dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan lembaga pelayanan dan pemberdayaan sumber daya manusia berupa lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian dan pengembangan.

Belajar dari Vandana Shiva ketika menyuarakan dampak globalisasi bagi kehidupan komunitas India, komunitas lokal mampu berhadapan dengan gempuran keras globalisasi dengan cara-cara mereka sendiri. Komunitas *Pattuvam Panchayat* membangun keanekaragaman kehidupan mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Mereka mengerjakan segala sesuatu secara alami seperti pertanian bebas dari zat-zat kimia, penanaman pohon-pohon untuk mengimbangi penebangan dan perusakan lingkungan dsb. Apa yang dilakukan komunitas *Pattuvam Panchayat* sebagai resistensi terhadap globalisasi ini begitu baik untuk menjadi refleksi bahwa dampak buruk yang ditimbulkan globalisasi membutuhkan sebuah gerakan untuk memperlambat dan mengurangi laju perkembangan dampak buruk globalisasi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan "kearifan lokal" yang dimiliki masing-masing daerah ataupun komunitas untuk "melawan" derasnya arus globalisasi.

Kearifan lokal milik Indonesia dapat ditemui pada nilai-nilai kekerabatan yang diwujudkan dalam gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan. Nilai-nilai ini bisa menjadi sebuah bentuk resistensi terhadap dominasi individualisasi yang diakibatkan globalisasi. Demikian juga budaya tenggang rasa yang turut merasakan dan berempati kepada orang lain, dengan kata lain menghargai sesama manusia dapat dijadikan "senjata" dalam memerangi "pasar bebas" globalisasi yang menjadikan manusia sebagai komoditi dengan harga tertentu. Penghargaan terhadap tradisi, upacara, ritual yang menjadi kekayaan komunitas lokal menjadi sebuah kekuatan yang dapat menjadi pengimbang kekuatan globalisasi. Walaupun demikian kearifan lokal jangan dijadikan dasar untuk bersifat "fundamental" atau menutup diri dari globalisasi, karena globalisasi juga memiliki dampak-dampak positif yang berguna bagi perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal inilah maka nilai-nilai atau identitas lokal harus kembali dihargai. Sebuah kesadaran diri yang berbasis komunitas harus ditingkatkan dalam kerangka memperkenalkan nilai-nilai lokal. Kekerabatan merupakan nilai yang mungkin dalam konteks ini dapat dikembangkan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Harapannya dalam kekerabatan, gotong-royong, tidak ada individu ataupun kelompok yang mencoba untuk mengambil keuntungan sendiri. Kearifan-kearifan lokal bisa menjadi sebuah bentuk resistensi terhadap dominasi

"individualisasi" yang diakibatkan globalisasi. Demikian juga budaya "tenggang rasa" yang turut merasakan dan berempati kepada orang lain, dengan kata lain menghargai sesama manusia dapat dijadikan nilai-nilai hidup di tengah semakin miskinnya penghargaan terhadap manusia. Kita merasakan bahwa di era global manusia menjadi seperti barang, manusia dijadikan sebagai komoditi dengan harga tertentu, maka nilai-nilai kebersamaan dan budaya tenggang rasa semakin dibutuhkan di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini negara dapat ditempatkan dalam posisi lokal, meski hal ini tidak mudah karena dengan demikian negara harus mampu memposisikan diri sebagai "penyedia kondisi atau ruang yang lebih aman, dimana tersedia lebih banyak alternatif bagi rakyat (individu) mencapai dan mengembangkan aspirasinya." Selain itu, beberapa tindakan kongkrit yang perlu dilakukan oleh negara, adalah pembenahan infra dan supra struktur politik, supremasi hukum dan *cleen governance*, serta pengembangan *civil society*. Tugas seperti ini, tentunya tidak hanya merupakan tanggungjawab negara, namun harus dilakukan dalam bentuk kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pengertian, kearifan lokal dalam konteks negara, tidak akan terwujud dengan baik jika tidak ada ruang kebebasan yang dijamin oleh pemerintah, pihak swasta tidak akan melakukan aktivitas ekonomi dan lainnya yang menjamin kelangsungan usahanya demi kepentingan bersama, sebaliknya pemerintah dan swasta tidak akan berhasil dalam kinerjanya jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat.

Dalam kondisi lokal semacam ini maka hal penting untuk diketengahkan dalam proses pembangunan di Indonesia adalah menjaga, menjamin, dan mengembangkan kepercayaan rakyat dan pihak luar (termasuk investor asing) akan pentingnya pembangunan. Juga perlunya menyediakan kondisi yang lebih *favourable* dimana tersedia lebih banyak alternatif bagi rakyat (individu) untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Dengan demikian pilihan antara jalan mana yang akan ditempuh sebenarnya kembali diserahkan kepada kewenangan rakyat, maka rakyatlah yang lebih mempunyai kewenangan dan kesempatan, sedangkan pemerintahan (negara) hanya menyediakan kondisi yang memberi ruang bagi warga masyarakat untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan keahliannya.

Penutup

Pembangunan ekonomi selama ini telah menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi dan bukan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu diingat bahwa masyarakat yang makmur dan beradab harus memberikan jaminan bahwa semua warganya telah mendapatkan pelayanan yang layak untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Di era globalisasi identitas lokal akan menjadi sebuah kekuatan yang muncul dan ingin tetap eksis. Dalam hal ini maka usaha kontekstual menyapa bukan saja berdasarkan otoritas eksternal namun juga berpangkal pada otoritas internal dari kenyataan hidup sebagai konteks, karena terdapat konteks yang berbeda. Dengan mengembangkan kontekstualisasi maka globalisasi mampu menyapa komunitas lokal dan bermacam-macam kelompok dalam masyarakat dalam dialog yang jujur dan terbuka. Kontekstual mengungkapkan keperdulian dan berusaha menawarkan intrepetasi mengenai pengalaman hidup dan selanjutnya orientasi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal itu akan dimulai dari lokal.

Kontekstualisasi membutuhkan keterbukaan luas terhadap bermacam-macam tradisi dan kekhasan yang dimiliki komunitas lokal dan kekayaan sejarah. Dengan demikian usaha kontekstualisasi membutuhkan sikap hormat kritis ke dalam maupun ke luar. Dalam keterbukaan kritis itu gerak kontekstualisasi dapat melepaskan diri dari lingkungan momen sejarah yang terbatas (tradisionalisme, fundamentalisme), sekaligus juga bersikap kritis terhadap kebakuan bentuk-bentuk aktual yang sedang berjalan. Melalui refleksi dialogal kritis dapat terjadi bahwa hal-hal yang dilupakan dari yang lokal oleh globalisasi akan ditemukan kembali.

Kata kuncinya adalah pemberdayaan rakyat dan menggali potensi lokal. Apabila potensi komunitas lokal digali dan dikembangkan, maka mereka akan menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Dalam hal inilah dibutuhkan motivasi yang benar pada setiap orang sebelum melakukan usaha pembangunan diri sehingga melakukan atas dasar kesadaran bukan pemaksaan. Keberhasilan diperoleh merupakan kebanggaan yang pada gilirannya akan ditularkan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian proses menjadi penting dan bukan hasil akhir. Setiap orang, setiap komunitas perlu menemukan diri sendiri, melakukan dari apa yang tersedia di tempat masing-masing, yang mungkin selama ini diabaikan padahal

merupakan sumber daya yang sangat kaya, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

Vandana, Shiva. *“Ecological Balance in an Era of Globalization”* in Paul Wapner and Laster Edwin J. Ruiz (eds) *Principled World Politics: The Challenge of Normative International Relation*, Rowman & Littlefield, 2000.

Frank, J. Lechner and John, Boli. *“The Globalization Reader (Second Edition)*. Blackwell Publishing, 2000.

Arjun, Appadurai. excerpted from *“Disjuncture in the Global Cultural Economy”* in *Modernity as Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press, 1996.

Roland, Robertson, *Globalization : Social Theory and Global Culture*. Sage Publishing, 1992.

Anthony, Giddens. *Beyond Left and Right*, Cambridge: Polity Press, 1994.

_____, *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 1990